

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting adalah persoalan gizi yang umum di seluruh dunia, apalagi di kawasan dunia ketiga seperti negara Indonesia. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Di Indonesia, berdasarkan data *Asian Development Bank*, pada tahun 2022 persentase *Prevalance of Stunting Among Children Under 5 Years of Age* di Indonesia 31,8 persen, jumlah tersebut, menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 diwilayah Asia Tenggara, Selanjutnya pada tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan angka stunting Indonesia berhasil turun menjadi 21,6 persen.

Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting pada balita Nasional sebesar 21,5%, turun 0,1 persen dari tahun 2022 sebesar 21,6 % dengan kasus tertinggi di antara anak berusia 24-35 bulan. Prevalensi stunting tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi balita wasting (7,7%), balita dengan berat badan kurang (17,1%), dan balita dengan berat badan berlebih (3,5%). Ini menunjukkan bahwa stunting merupakan masalah gizi darurat yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan perlu segera ditangani secara menyeluruh, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat (siswati, 2018).

Permasalahan tumbuh kembang anak dikenal dengan istilah stunting. Stunting sebagian besar disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai selama tahap pertumbuhan anak (BPS, 2022). Menuntaskan semua bentuk malnutrisi dan kelaparan serta mencapai ketahanan pangan merupakan target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Salah satu targetnya adalah mengurangi angka stunting hingga 40% pada tahun 2025 (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2018). Standar pertumbuhan anak menurut WHO mendefinisikan stunting sebagai kondisi di mana nilai z-score kurang dari -2 SD (standar deviasi)

berdasarkan Indeks panjang badan terhadap umur (PB/U) atau tinggi badan terhadap umur (TB/U) (WHO, 2018).

Namun, tingkat stunting di Indonesia dan Sumatera Barat masih lebih tinggi dari 20%, yang ditentukan oleh WHO. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas dan mengkaji faktor sosial ekonomi dan makro ekonomi yang mempengaruhi stunting pada saat ini. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah stunting. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk meniadakan kelaparan dan seluruh jenis malnutrisi pada tahun 2030 dan mencapai ketahanan pangan. Stunting umumnya merupakan gambaran tentang tingkat gizi masyarakat.

Selain itu, masalah stunting pada balita Indonesia merupakan masalah intergenerasi yang memerlukan pemulihan dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan bentuk malnutrisi lain (Hasan *et al.*, 2023). Stunting tidak hanya menyebabkan tingginya risiko morbiditas dan mortalitas, namun dapat berdampak pada rendahnya intelektualitas dan kemampuan kognitif yang berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*human capital*) (Pusmaika *et al.*, (2022).

Stunting adalah satu dari banyaknya target SDGs yang ada di tujuan pertumbuhan berkelanjutan kedua untuk meniadakan lapar dan banyaknya malnutrisi di tahun 2030 dan untuk ketahanan pangan (Sentongo *et al.*, 2021). Jika prevalensi stunting di wilayah banyak, akan bisa disimpulkan daerah itu mempunyai masalah pembangunan yang umum, kurangnya air bersih, kurang pendidikan, dan kurang kesehatan yang akan mencapai kemiskinan (Essa *et al.*, 2021).

Penyebab stunting dapat dipecahkan menjadi beberapa kategori berbeda. Cara seseorang membesarkan anak merupakan salah satu faktor risiko yang pasti, selain pertimbangan pola makan. Masalah gizi buruk dan stunting dapat diperburuk oleh faktor-faktor seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemberantasan permasalahan gizi buruk dan stunting perlu dilakukan secara menyeluruh melalui strategi multidisiplin yang melibatkan partisipasi banyak pihak yang terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga (Kalsum & Jahari, 2015). Berbeda dengan penelitian Nurmala *et al.*, (2020), permasalahannya dapat dilakukan beberapa solusi seperti

memberikan informasi pendidikan dan kesehatan terkait pola asuh yang tepat, pola asuh orang tua mempunyai pengaruh terhadap kejadian stunting, hal ini dikarenakan orang tua selalu mendampingi anak dan memberikan perhatian terutama dalam memberikan asupan gizi yang baik, gizi yang baik dan mencegah risiko stunting serta kaitannya dengan ibu.

Menurut Cobayashi *et al.*, (2013), apabila tingkat stunting di suatu wilayah tinggi, dapat dipastikan bahwa wilayah tersebut menghadapi berbagai masalah pembangunan umum seperti kemiskinan, ketersediaan air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, masalah stunting pada balita Indonesia adalah persoalan intergenerasi yang membutuhkan rekonstruksi dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan bentuk malnutrisi lain (Siswati, 2018). Stunting tidak hanya menyebabkan tingginya risiko morbiditas dan mortalitas, namun dapat berdampak pada rendahnya intelektualitas dan kemampuan kognitif yang berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*human capital*).

Prevalensi balita pendek yang di peroleh suatu daerah akan menjadi ukuran keberhasilan program yang sudah di upayakan oleh pemerintah dalam pencapaian target, oleh karena itu stunting menjadi masalah serius yang menjadi komitmen serius antara pemerintah dan masyarakat dalam menuntaskan hal ini (Ramadhita, 2020). Pemerintah melalui program *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam target yang di harapkan 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, penurunan stunting dan wasting pada balita (*Sustainable & Goals, 2016*). Anak stunting menghadapi kendala pertumbuhan karena kekurangan gizi, penyakit, dan faktor lingkungan. Dampak jangka panjang yang signifikan dari stunting termasuk penurunan kinerja kognitif dan keterampilan motorik, serta peningkatan risiko terkena penyakit kronis di kemudian hari. Stunting memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk kemungkinan meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Anak-anak stunting cenderung memiliki keterampilan yang lebih rendah, kemampuan kognitif yang lebih rendah, dan kondisi kesehatan yang lebih buruk. Ini dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi karena menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tetap (Yadika, 2019).

Riwayat gestasi ibu, seperti dimensi tubuh yang kecil, interval kehamilan yang terlalu singkat, jumlah anak yang dilahirkan berlebihan, usia ibu yang terlalu belia atau lanjut saat hamil, memperbesar kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan rendah (di bawah 2500 gram atau 2,5 kilogram) serta kekurangan nutrisi selama masa gestasi. Faktor tambahan termasuk penyapihan dini, kurangnya ASI eksklusif, dan ketidakmampuan untuk melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Stunting juga dikaitkan dengan kondisi sanitasi dan sosial ekonomi, di antara faktor lain (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Sumatera Barat kondisi ekonomi pascapandemi, kesenjangan pendidikan dan keterampilan, lambatnya pertumbuhan sektor usaha, serta kebijakan pemerintah. Upaya untuk mengurangi pengangguran perlu melibatkan peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan penyesuaian terhadap faktor sosial dan budaya yang ada, termasuk tingkat industrialisasi, pendidikan dan akses terhadap pasar kerja. Pengangguran terbuka mencakup orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik yang sudah pernah bekerja maupun yang belum, dan mereka yang mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang mereka cari, variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Damayanti & Sentosa 2020). Pemerintah daerah di Sumatera Barat telah mengimplementasikan (Kamarni *et al.*, 2019), berbagai program untuk mengurangi pengangguran yang bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memfasilitasi akses ke peluang kerja. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dan promosi investasi juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah ini (Kustanto, 2021). Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Keterkaitan antara parsial pengangguran dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan (Supriyanto, 2020). Namun, stunting memiliki sebab akibat yang buruk dan tidak signifikan dalam IPM. Kab/kota Provinsi Jawa Barat pada 2018 sampai 2021. Secara signifikan variabel pengangguran, kemiskinan, dan stunting berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018- 2021.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan di beberapa wilayah, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur (Lailiyah, 2023). Perlu adanya kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan di masa mendatang. Kemiskinan Ramadhan, (2018). Kemiskinan menunjukkan hubungan sebab akibat terhadap pertumbuhan ekonomi dan prevalensi stunting sebesar 0,06% dalam jangka panjang. Penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan pengeluaran masyarakat, dan mendorong peningkatan pendapatan antara lain melalui peningkatan dan perluasan bantuan sosial dan jaminan sosial.

Stunting atau pertumbuhan terhambat pada anak, merupakan hasil dari kombinasi buruknya sanitasi dan kemiskinan. Anak-anak yang mengalami stunting berisiko tinggi menghadapi masalah kesehatan jangka panjang, sehingga penanganan kedua variabel sebelumnya sangat penting untuk mengurangi angka stunting dan tingkat kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan akses yang terbatas terhadap fasilitas sanitasi. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak, yang berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak mereka. Stunting tidak memiliki hubungan kausalitas, kemiskinan dan stunting memiliki kausalitas searah dari kemiskinan ke stunting (Rosmiyati *et al.*, (2021).

Penelitian Apergis *et al.*, (2011) yang menyatakan bahwa stunting berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek dan panjang. Kemudian penelitian Hassan *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antaran kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan Nasrun & Rahmalia (2018), di mana ketimpangan pendapatan yang tinggi menghambat akses yang merata terhadap gizi dan pelayanan kesehatan, sehingga meningkatkan risiko stunting pada anak. Mengurangi ketimpangan pendapatan dianggap penting dalam penanggulangan stunting. Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Andiny &

Mandasari (2017) yang menyatakan bahwa variabel kemiskinan tidak mempengaruhi variabel ketimpangan.

Penelitian Sari, *et al.*, (2020) yang menjelaskan bahwa kemiskinan berkontribusi terhadap terjadinya peningkatan prevalensi stunting di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saleh, *et al.*, (2021) ; Kustanto (2021) yang menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan prevalensi stunting dengan menggunakan metode VECM memiliki kualitas searah dari kemiskinan ke stunting.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Menurut Fadhilah *at al.*, (2022). Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan baiknya kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan jumlah kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Zuhdiyaty & Kaluge (2017), dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun berdasarkan penelitian Alhudori (2017) IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dimana dengan meningkatnya IPM juga akan meningkat angka kemiskinan.

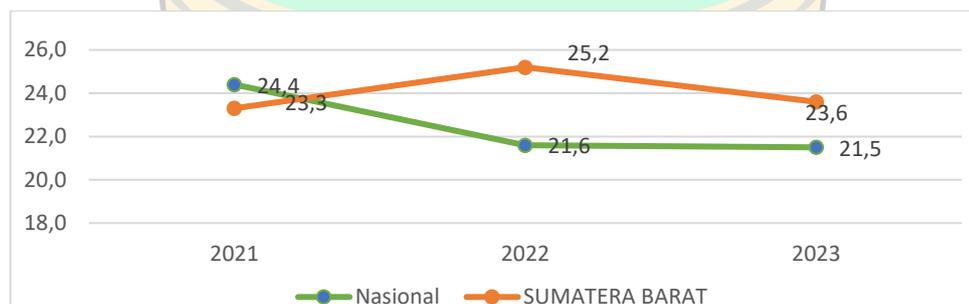
Menurut penelitian Ogbeide & Agu (2015) kemiskinan berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan bahwa kemiskinan dan kesenjangan pendapatan mempunyai hubungan dua arah. Jadi jika pemerintah ingin menetapkan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan memperkecil kemiskinan yang ada dan begitu sebaliknya, jika pemerintah ingin menetapkan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di Nigeria sebaiknya tidak hanya fokus pada kemiskinan, tetapi juga memadukan kebijakan pemerataan untuk mengentakan ketidaksetaraan melalui pajak progresif dan subsidi untuk kebutuhan dasar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad & Triani (2018) bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kondisi kemiskinan yang ada di masyarakat dapat mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengejar laju pendapatan masyarakat menengah atas dan inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong naiknya kesenjangan pendapatan. Sementara itu, kesenjangan pendapatan dapat mempengaruhi kemiskinan disebabkan distribusi pendapatan

yang lebih baik dapat membantu orang yang kelompok menengah ke bawah untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan.

Stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel sosial ekonomi salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi keluarga yang dilihat dari tingkat pendidikan orang tua (Wigati & Ciptanurani 2023). Jika tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua tinggi, maka semakin baik kesempatan mereka untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk menyediakan lingkungan yang bagus dan sehat bagi anak-anak mereka (Al Jawaldeh *et al.*, 2020), sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Cholifatun *at al.*, 2015).

Cakupan imunisasi dasar merupakan variabel sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat stunting di Indonesia. Imunisasi ialah kemajuan yang signifikan dalam pencegahan penyakit dan imunoprofilaksis (Baratawidjaja & Rengganis 2012). Desa dan kota adalah dua kategori di mana penentu tempat tinggal diklasifikasikan. Stunting cenderung lebih sering terjadi pada anak-anak yang bermukim di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Risiko stunting di pedesaan lebih tinggi dan berhubungan dengan karakteristik keluarga, pendapatan keluarga, alokasi sumber daya, struktur keluarga, jaringan sosial, serta layanan kesehatan anak (Reyes *et al.*, 2014).

Selanjutnya grafik yang menjelaskan tentang Perbandingan Persentase Stunting Nasional dan Sumatera Barat periode 2021-2023 sebagai berikut :



Grafik 1. Perbandingan Persentase Stunting Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2021 - 2023

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2022, Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

Berdasarkan Grafik 1 di atas stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, merupakan isu kesehatan yang serius di Indonesia. Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang serius di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. secara Nasional, angka stunting menunjukkan penurunan dari

24.4% pada 2021 menjadi 21.5% pada 2023. Meskipun ada penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa satu dari lima anak mengalami stunting, yang merupakan kondisi yang berisiko tinggi. Dari tahun 2021 hingga 2023, prevalensi stunting di tingkat Nasional dan di Sumatera Barat menunjukkan tren yang menarik untuk dianalisis.

Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sumatera Barat sedikit lebih rendah, yaitu 23,3% dari Nasional. Namun, data pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan di Sumatera Barat dengan prevalensi stunting mencapai 25,2%, sedangkan tingkat Nasional mengalami penurunan menjadi 21,6%, hal ini mencerminkan peningkatan yang mengkhawatirkan, ada upaya serius dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengurangi prevalensi stunting, dengan program intervensi gizi yang lebih fokus dan berkelanjutan.

Situasi ini menjadi perhatian karena stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, serta berdampak pada produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dalam, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Sumatera Barat tercatat kembali menurun menjadi 23,6%, tetapi angka ini masih menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Kondisi geografis, ekonomi, serta budaya di Sumatera Barat dapat menjadi faktor penyebab terjadinya stunting. Masyarakat di daerah pedesaan sering kali mengalami kesulitan akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah stunting, termasuk peningkatan kesadaran gizi, akses terhadap layanan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai target penurunan stunting yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat harus terus digalakkan agar generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Sumatera Barat masih tertinggal di belakang angka Nasional. Penurunan ini mencerminkan efektivitas program gizi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang.

Dalam hal ini, penting untuk menekankan bahwa meskipun ada penurunan prevalensi stunting, Sumatera Barat tetap memerlukan perhatian khusus dan intervensi yang lebih intensif. Berbagai faktor seperti aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan tentang gizi, serta kondisi sosial ekonomi turut mempengaruhi tingkat stunting di daerah ini. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting yang lebih signifikan di masa depan.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan kemajuan yang dapat dicapai, tetapi juga menggarisbawahi tantangan yang masih harus dihadapi, terutama di Sumatera Barat, dalam upaya mengatasi stunting secara menyeluruh. Berikut tabel variabel makro ekonomi dan stunting di Sumatera Barat pada periode 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat Periode 2021 – 2023

VARIABEL	2021	2022	2023
Pengangguran	6.52	6.28	5.94
Kemiskinan	5.92	5.95	4.95
Ketimpangan pendapatan	0.306	0.3	0.280
Indeks Pembangunan Manusia	74.56	75.16	75.64
Stunting	23,3	25,2	23,6

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021-2023, Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2022, Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Pada tabel 1 memperlihatkan perkembangan sosial ekonomi, dalam periode 2021 hingga 2023 di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa indikator sosial ekonomi. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 6,52% di tahun 2021 menjadi 5,94% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan lapangan kerja dan upaya pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi. Pengangguran di Sumatera Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan struktural dalam ekonomi, dampak pandemi COVID-19, dan sektor-sektor unggulan yang kurang mampu menyerap tenaga kerja. Pada periode 2021-2023, pemulihan ekonomi menjadi fokus utama, tetapi masih terdapat tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Di sisi lain, angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang positif. Dari 5,92% pada tahun 2021, angka kemiskinan turun menjadi 4,95% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah daerah, yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan aksesibilitas layanan dasar. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun ada upaya peningkatan kesejahteraan melalui program-program pemerintah, dampak ekonomi akibat pandemi serta ketergantungan pada sektor informal menjadi tantangan. Indikator kemiskinan mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan koefisien Gini, menunjukkan penurunan dari 0,306 di tahun 2021 menjadi 0,280 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, yang dapat meningkatkan kohesi sosial dan stabilitas ekonomi. Ketimpangan pendapatan seringkali menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Di Sumatera Barat, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial-ekonomi yang berbeda, dapat memengaruhi distribusi pendapatan. Kebijakan redistributif menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 74,56 pada tahun 2021 menjadi 75,64 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang menjadi fokus utama pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kualitas hidup berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Di Sumatera Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang relatif baik, namun masih terdapat masalah kesehatan dan gizi yang perlu ditangani, termasuk isu stunting.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam masalah stunting. Angka stunting di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 25,2% di tahun 2022 menjadi 23,6% di tahun 2023, setelah meningkat dari 23,3% di tahun 2021. Meskipun ada penurunan, stunting tetap menjadi isu kesehatan yang krusial, yang mempengaruhi masa depan anak-anak dan produktivitas masyarakat. Stunting, atau kekurangan gizi kronis pada anak, merupakan masalah serius yang

dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif. Di Sumatera Barat, program kesehatan dan gizi menjadi fokus untuk mengurangi angka stunting. Faktor-faktor seperti pendidikan orang tua, akses terhadap layanan kesehatan, dan pola makan menjadi kunci dalam menangani masalah ini. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa indikator, perhatian harus tetap diarahkan pada isu-isu yang masih memerlukan perbaikan, seperti penanganan stunting dan penguatan program-program sosial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang inklusif.

Hal ini sebagian besar dikarenakan program pemberian makanan tambahan dan edukasi kesehatan ibu yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah dan didukung oleh organisasi internasional (Mphamba *et al.*, 2024). Pada tahun 2023, pemerintah provinsi meluncurkan program Zero Stunting yang berfokus pada integrasi lintas sektor dalam menangani masalah stunting (Ahmad & Triani 2018). Program ini melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan (Agustini *et al.*, 2023). Stunting atau disebut juga stunting adalah status gizi berdasarkan Indeks MUAC atau TB/U dalam standar antropometri untuk mengevaluasi status gizi anak, nilai Z-Score harus berada di bawah ambang batas -2 SD hingga -3 SD, yang menunjukkan balita pendek atau *stunted*, dan sangat pendek/sangat *stunted* menunjukkan balita buruk (Dewi *et al.*, (2021). Hubungan ini kausalitas antara kemiskinan dan stunting di Indonesia ini menunjukkan pengaruh yang signifikan keduanya (Putri & Muljaningsih 2022).

Data dari 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan stunting saling berkaitan secara langsung mempengaruhi. Upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan ini secara komprehensif. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan peluang ekonomi dapat membantu mencapai kesejahteraan yang lebih merata di Sumatera Barat. Hal ini juga terbukti dengan beberapa studi antara lain (Purwanti & Nurvita, 2019), stunting dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang diukur dari

pengeluaran per kapita. Pendapatan yang rendah akan menyebabkan keterbatasan daya beli, sehingga menyulitkan pengaturan pola makan, khususnya bagi anak-anak mereka. Sebaliknya, pendapatan yang lebih tinggi akan berkontribusi pada perbaikan kondisi kesehatan dan gizi. Untuk mengatasi stunting di Sumatera Barat, perlu pendekatan multi-dimensi yang mempertimbangkan hubungan kompleks antara pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengurangan stunting tidak hanya membutuhkan intervensi di sektor kesehatan, tetapi juga perluasan akses pendidikan dan peningkatan lapangan kerja.

Putra & Amis (2022) meneliti bahwa variabel pengangguran mempunyai keterkaitan jangka panjang baik dengan Indeks Pembangunan Manusia, perkembangan ekonomi mempunyai keterkaitan yang buruk dengan Indeks Pembangunan Manusia dan tidak merata pendapatan mempunyai hubungan yang buruk dengan perkembangan manusia. Oleh karena itu, untuk tempo yang pendek variabel pengangguran berpengaruh baik terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mempunyai hubungan buruk antara variabel tidak merata pendapatan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari banyaknya faktor yang memiliki dampak kemiskinan ialah pengangguran, menurut penelitian Bintang (2018) pengangguran berhubungan baik dan signifikan dengan kemiskinan. Sedangkan penelitian Yacoub (2013) berbeda sama teori hubungan pengangguran dan kemiskinan, yang beralasan individu pengangguran tidak dapat dipastikan teori hubungan pengangguran dan kemiskinan, yang beralasan individu menganggur belum dipastikan miskin, alasannya penyebab keluarga lingkungan miskin, yang mana bisa menompang kehidupan yang menganggur.

Menurut penelitian (Nasrun & Rahmania, 2018), menunjukkan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara dikenal juga sebagai ketimpangan ekonomi. Semakin besar rasio pendapatan yang diperoleh kelompok pendapatan tertinggi terhadap pendapatan kelompok yang memiliki pendapatan terkecil, maka ketimpangan itu makin naik (Todaro & Smith 2014). Jika tingkat ketimpangan ekonomi mengalami peningkatan maka peluang terjadinya stunting juga semakin besar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi

ketimpangan pendapatan. Ketika Indeks Pembangunan (IPM) meningkat, akan menurunkan ketimpangan pendapatan, tetapi ketika Indeks Pembangunan menurun, ketimpangan akan meningkat (Farhan & Sugianto, 2022).

Jika dilihat dari variabel diatas, adanya kenaikan angka stunting pada tahun 2022, juga terjadi kenaikan pada angka kemiskinan. Hal ini juga terlihat pada angka ketimpangan pendapatan yang hanya sedikit penurunannya tahun 2022 dibanding tahun 2021. Begitu juga dengan variabel tingkat pengangguran, penurunan angka pengangguran tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun 2023. Hal ini perlu dikaji, apakah juga terjadi pada 19 kab/kota di Sumatera Barat. Hasil kajian data variabel ini, diharapkan memberikan informasi terkait variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat stunting Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis kausalitas antara variabel makro ekonomi dan stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023, dilihat dari kondisi 19 Kab/Kota yang masalah stuntingnya cukup tinggi maka perlu untuk di kaji faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka stunting berdasarkan data indikator makroekonomi tersebut. Hal ini penting karena dampak stunting pada anak bukan hanya pada pertumbuhan anak secara fisik, tetapi juga pada otak anak sehingga kemampuan kognitif terbatas dan akan berdampak pada masa depan. Sehingga, berdasarkan penelahaan terhadap faktor-faktor penyebab stunting diatas, peneliti terdorong untuk menyelidiki variabel makro ekonomi berpengaruh terhadap stunting pad 19 Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Penulis penelitian ini akan merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dan digunakan sebagai referensi berdasarkan penjelasan tentang latar belakang stunting dan masalah sosial ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2021–2022. Perumusan masalahnya meliputi:

1. Bagaimana hubungan kausalitas pengangguran terhadap stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023 ?
2. Bagaimana hubungan kausalitas kemiskinan terhadap stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023 ?

3. Bagaimana hubungan kausalitas ketimpangan pendapatan terhadap stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023 ?
4. Bagaimana hubungan kausalitas Indeks pembangunan manusia terhadap stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengangguran dengan stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023.
2. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara kemiskinan dengan stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023.
3. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Ketimpangan Pendapatan dengan stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023.
4. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Indeks Pembangunan Manusia dengan stunting di Sumatera Barat periode 2021-2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil positif yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Ini bisa berupa penemuan pengetahuan baru, solusi untuk masalah yang ada.

1. Manfaat Akademis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan manfaat dan wawasan baru bagi mahasiswa yang akan mengeksplorasi dampak pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, IPM, dan stunting di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk memulai program yang berkaitan dengan

pemahaman dan penanganan masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan stunting.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini meneliti Stunting dan Masalah Makro Ekonomi di Sumatera Barat pada Tahun 2021–2023. Data dikumpulkan dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2022, Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dan website Badan Pusat Statistik (BPS).

